

Kabupaten Pasuruan

PERUBAHAN RENCANA KERJA Tahun 2026



DINAS KETENAGAKERJAAN

Jl. Dr. Soetomo No. 101 Bangil, Telp (0343) 421016,
Fax. 421016 Kode Pos 67153. Pasuruan.
Email: disnaker@pasuruankab.go.id.

i. DINAS KETENAGAKERJAAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 343 bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Penyesuaian Pagu Anggaran.

Berdasarkan Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Ketenagakerjaan sampai dengan triwulan II Tahun 2026 terdapat beberapa target kinerja dan anggaran yang perlu disesuaikan dengan program prioritas pembangunan Tahun 2026 dan adanya efisiensi anggaran.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 adalah :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 6) Undang Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
- 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

- 14) Permendagri 104/2018 tentang penilaian dan pemberian penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- 17) Permendagri 18/2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- 18) Permen terkait SPM (sesuai urusan)
- 19) Permen teknis lainnya (sesuai urusan)
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 21) Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- Intruksi Presiden no. 9 Tahun 2009 tentang Pengarusutamaan gender (PUG);
- 22) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 23) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 24) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- 25) Permendagri 104/2018 tentang penilaian dan pemberian penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah
- 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- 27) Permendagri 18/2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- 28) Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 30) Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan PUG di Daerah;
- 31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 32) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- 33) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
- 34) Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;

- 35) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur 2005 – 2025;
- 36) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 - 2029 ;
- 37) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan 2025-2045;
- 38) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 39) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029;
- 40) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026;
- 41) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 39 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026;
- 42) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas;
- 43) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 63 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 44) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 29 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan yang telah sesuai dengan program prioritas daerah dan hasil evaluasi dari capaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan, yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program/kegiatan di tahun berjalan.

Sedangkan tujuan dari disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini, adalah:

- a. Menyelaraskan kembali program/kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan dengan Perubahan RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026;
- b. Memastikan pelaksanaan program/kegiatan sesuai tugas, pokok dan fungsi dan berjalan maksimal; dan
- c. Menyediakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RKA-P) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (Perubahan KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Perubahan Anggaran Sementara (Perubahan PPAS).

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

- 2.1. Evaluasi Hasil Renja 2026 Triwulan II
- 2.2. Isu-Isu Aktual Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah

3.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB. II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

2.1 Evaluasi Hasil Renja 2026 Tribulan II

Evaluasi ini berfungsi sebagai alat ukur pengendalian pelaksanaan program berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk memastikan arah kebijakan sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra) Daerah.

Tahun 2026 Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan melaksanakan 1 (satu) Program Rutin dan 4 (empat) Program di Bidang Ketenagakerjaan dan 1 (Satu) Urusan pilihan, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Perencanaan Tenaga Kerja
3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
4. Program Penempatan Tenaga Kerja
5. Program Hubungan Industrial
6. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

dengan alokasi anggaran sebagaimana tertuang pada DPA/A.1/2.07.3.32.0.00.01.0000/001/2026 Tanggal 2 Januari 2026 sebesar Rp. 20.956.482.448,- Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RENJA-SKPD Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, total anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi sebesar Rp20.951.482.448, dengan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II sebesar Rp7.333.758.315, atau sekitar 35,00% dari total anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi.

Realisasi anggaran tertinggi terdapat pada Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, yaitu sebesar Rp2.662.268.970 dari anggaran Rp6.760.509.092 atau sekitar 39,38%. Selanjutnya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp3.408.260.127 dari anggaran Rp8.773.020.556 atau sekitar 38,85%.

Program Hubungan Industrial terealisasi sebesar Rp1.192.263.924 dari anggaran Rp4.952.352.800 atau sekitar 24,07%, sedangkan Program Penempatan Tenaga Kerja

terrealisasi sebesar Rp70.965.294 dari anggaran Rp440.530.000 atau sekitar 16,11%.

Sementara itu, Program Perencanaan Tenaga Kerja dan Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi belum menunjukkan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2026. Dokumen evaluasi menjelaskan bahwa sebagian kegiatan tersebut memang dijadwalkan pelaksanaannya pada triwulan berikutnya.

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan sampai dengan triwulan II Tahun 2026 ini, sebagaimana tertuang pada tabel berikut :

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten yang mengacu pada sasaran RKPD :
 IKU PD: Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
 Target : 71.60%

[illegible]

		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	900	Rp.	21,961,500	900	Rp.	2,778,000	900	Rp.	15,400,000	0	Rp.	-	600	Rp.	6,436,000				600		6,436,000	66.67%	41.79%			9,214,000			42%	
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60	Rp.	915,769,448	12	Rp.	352,146,818	12	Rp.	502,674,592	3	Rp.	72,567,025	3	Rp.	64,355,320				6		136,922,345	50.00%	27.24%			489,069,163			53%	
		3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	Rp.	32,527,910	1	Rp.	20,749,924	1	Rp.	21,359,000	0	Rp.	-	1	Rp.	10,887,222				1		10,887,222	100.00%	50.97%			31,637,146			97%	
		4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	Rp.	39,677,110	0	Rp.	36,060,325	1	Rp.	41,402,200	0	Rp.	-	1	Rp.	10,333,696				1		10,333,696	100.00%	24.96%			46,394,021			117%	
		6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya BMD kondisi baik																														
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan 1 Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	14	Rp.	165,150,480	14	Rp.	139,722,920	14	Rp.	190,475,000	4	Rp.	31,690,000	5	Rp.	41,438,000				9		73,128,000	64.29%	38.39%			212,850,920			129%	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 2 Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	14	Rp.	28,696,360	14	Rp.	12,574,900	14	Rp.	22,960,000	2	Rp.	757,500	3	Rp.	1,155,000				5		1,912,500	35.71%	8.33%			14,487,400			50%	
		3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	2	Rp.	19,965,000	2	Rp.	-	2	Rp.	400,000,000	0	Rp.	-	0	Rp.	-				0		-	0.00%	0.00%			-			0%	
		4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	2	Rp.	17,303,000	2	Rp.	-	2	Rp.	127,665,679	0	Rp.	-	1	Rp.	11,860,000				1		11,860,000	50.00%	9.29%			11,860,000			69%	
		2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Tersusunya Dokumen RTK Makro sesuai ketentuan (%)																														
		1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Terlaksananya Penyusunan Dokumen RTKD Makro																														
			1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	1	Rp.	172,020,000	1	Rp.	8,882,000	1	Rp.	23,820,000	0	Rp.	-	0	Rp.	-				0		-	0.00%	0.00%			8,882,000			5%
			2	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang)	5	Rp.	20,120,000	0	Rp.	-	5	Rp.	1,250,000	0	Rp.	-	0	Rp.	-				0		-	0.00%	0.00%			-			0%
		3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Prosentase Pelaksanaan Pelatihan berbasis Kompetensi (%)																														
			1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Terlaksananya Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi																													
				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	500	Rp.	15,439,358,650	250	Rp.	3,422,735,546	500	Rp.	6,610,409,092	128	Rp.	1,044,777,413	154	Rp.	1,604,628,807				282		2,649,406,220	56.40%	40.08%			6,072,141,766			39%
				Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga)	12	Rp.	1,610,510	4	Rp.	1,488,750	12	Rp.	5,000,000	0	Rp.	-	3	Rp.	1,160,000				3		1,160,000	25.00%	23.20%			2,648,750			164%
			3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit)	10	Rp.	-		Rp.	822,520,983	10	Rp.	-	0	Rp.	-	0	Rp.	-				0		-	0.00%	0.00%			822,520,983			0%
			4	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Jumlah kesepakatan/ koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas	10	Rp.	1,207,882,500		Rp.	-	1	Rp.	3,420,000	0	Rp.	-	0	Rp.	790,000				0		790,000	0.00%	23.10%			790,000			0%
			2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terlaksananya Pembinaan Lembaga LPK Swasta																													
			1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	14	Rp.	20,147,480		Rp.	52,442,432	14	Rp.	70,215,000	0	Rp.	-	1	Rp.	2,400,000						2,400,000	0.00%	3.42%			54,842,432			272%
			3	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Terlaksananya Proses Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja																													
			1	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi						Rp.	7,739,999	2	Rp.	24,600,000	1	Rp.	2,693,000	0	Rp.	-						2,693,000	0.00%	10.95%			10,432,999			#DIV/0!
			4	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Terlaksananya Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil																													

		1 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)			Rp.	10,659,499	10	Rp.	24,353,000	3	Rp.	4,158,750	0	Rp.	-											4,158,750	0.00%	17.08%		14,818,249	#DIV/0!
		5 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Tenaga Kerja yang memperoleh Konsultasi Produktivitas Kerja																													
		1 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah (Dokumen)			Rp.	7,531,744	2	Rp.	22,512,000	2	Rp.	1,661,000	0	Rp.	-											1,661,000	0.00%	7.38%		9,192,744	#DIV/0!
		4 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan (%)																													
		1 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penempatan Pencari Kerja																													
		1 Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	5000	Rp.	-	Rp.	44,377,944	5.000	Rp.	75,000,000	###	Rp.	20,482,042	Rp.	2,537,500											23,019,542	0.00%	30.69%		67,397,486	#DIV/0!
		2 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)	200	Rp.	22,627,000	Rp.	-	200	Rp.	48,530,000	0	Rp.	-	0	Rp.	-									-	0.00%	0.00%		-	0%	
		3 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD (Orang)	20	Rp.	51,243,500	Rp.	19,064,220	20	Rp.	35,000,000	0	Rp.	-	0	Rp.	-									-	0.00%	0.00%		19,064,220	37%	
		4 Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	160	Rp.	7,320,500	Rp.	2,765,000	160	Rp.	5,000,000	0	Rp.	-	0	Rp.	-									-	0.00%	0.00%		2,765,000	38%	
		2 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Terlaksannnya Informasi Pasar Kerja																													
		1 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online (Dokumen)	1	Rp.	58,564,000	Rp.	39,682,500	1	Rp.	1,000,000	0	Rp.	400,000	0	Rp.	-										400,000	0.00%	40.00%		40,082,500	68%
		2 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Teraftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	100	Rp.	14,641,000	Rp.	4,979,879	100	Rp.	10,000,000	10	Rp.	581,252	0	Rp.	-										581,252	0.00%	5.81%		5,561,131	38%
		3 Job Fair/ Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/ Bursa Kerja (Orang)	5000	Rp.	43,923,000	Rp.	217,011,647	5.000	Rp.	230,000,000	0	Rp.	-	###	Rp.	44,215,000										44,215,000	0.00%	19.22%		261,226,647	595%
		3 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelindungan PMI																													
		1 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Tertayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani (Orang)				Rp.	-	50	Rp.	1,000,000	5	Rp.	550,000	0	Rp.	-										550,000	0.00%	55.00%		550,000	#DIV/0!
		2 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)	25	Rp.	43,688,744	Rp.	15,907,999	25	Rp.	35,000,000	0	Rp.	-	5	Rp.	2,199,500										2,199,500	0.00%	6.28%		18,107,499	41%
		5 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Prosentase PPHI yang diselesaikan dengan anjuran/ PB (%)																													
		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengesahan PP yang terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar di WLPK Online																													
		1 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Teraftar di WLPK Online (Perusahaan)	30	Rp.	13,310,000	Rp.	-	30	Rp.	1,100,000	0	Rp.	-	15	Rp.	500,000										500,000	0.00%	45.45%		500,000	4%
		2 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan)	30	Rp.	13,310,000	Rp.	-	30	Rp.	1,100,000	0	Rp.	-	0	Rp.	-										-	0.00%	0.00%		-	0%
		3 Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/ PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Teraftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	15	Rp.	66,550,000	Rp.	3,069,351,999	15	Rp.	188,500,000	Rp.	-	5	Rp.	45,765,000											45,765,000	0.00%	24.28%		3,115,116,999	4681%
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota																													

[illegible]

KETERANGAN PREDIKAT	
INTERVAL NILAI	PREDIKAT KINERJA
91% - 100%	SANGAT TINGGI
76% - <91%	TINGGI
66% - <76%	SEDANG
51% - <66%	RENDAH
0 - <51%	SANGAT RENDAH

2.2 Isu-isu Aktual Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Dinas Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh Sumber Daya Manusia dan didukung dengan Sarana Prasarana.

Pelaksanaan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi di Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang diprakarsai oleh BAPPERIDA Kabupaten Pasuruan menjadi forum penting dalam perumusan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan, sedangkan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi dengan Pemerintah dilaksanakan melalui rapat koordinasi yang secara berkala dilaksanakan dalam rangka sinergitas program Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Beberapa hal yang menjadi dasar dan pertimbangan dalam Renja Perubahan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tahun 2026, antara lain :

1. Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
3. Perubahan pagu anggaran, efisiensi belanja, pergeseran anggaran, serta kebutuhan pendanaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026 menjadi pertimbangan dalam menentukan kembali prioritas kegiatan Dinas Ketenagakerjaan
4. Penyesuaian terhadap kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
5. Apabila terdapat kebijakan atau regulasi baru yang diterbitkan setelah Renja awal ditetapkan, program dan kegiatan Dinas Ketenagakerjaan perlu diselaraskan. Kemendagri juga

menekankan sinkronisasi prioritas nasional dan daerah dalam perubahan RKPD 2026.

6. Penajaman program, kegiatan dan subkegiatan Program/kegiatan yang belum berjalan, mengalami kendala pelaksanaan, mengalami perubahan kebutuhan, atau membutuhkan penambahan anggaran dapat dilakukan penyesuaian dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah.
7. Penyesuaian terhadap hasil koordinasi dan verifikasi dengan Bapperida Program, kegiatan, subkegiatan, indikator dan pagu anggaran perlu disesuaikan dengan hasil pembahasan serta verifikasi dalam proses Perubahan RKPD dan Perubahan Renja.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah

Berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029, dimana dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggungjawab atas tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang merupakan fungsi/bidang kewenangannya guna mewujudkan apa yang menjadi arah kebijakan dan strategi daripada tujuan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Pada Perubahan Renja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2026, telah merumuskan 1 (satu) tujuan dengan 3 (tiga) sasaran yang sama dengan Renja sebelum perubahan, yaitu sebagai berikut :

Tujuan : **Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja** dengan indikator Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan kerja

Sasaran:

1. **Meningkatnya Tenaga Kerja yang Mempunyai Sertifikat** dengan indikator Persentase tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi;
2. **Meningkatnya Pencari Kerja Terdaftar** dengan Indikator Persentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan;
3. **Terselesainya Kasus Perselisihan HI melalui PB/Anjuran** dengan indikator Persentase Kasus Perselisihan HI yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama/ Anjuran;

4. **Meningkatnya Kepuasan Transmigran** dengan indikator Tingkat Kepuasan Transmigran
5. **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**, dengan indikator Nilai Sakip

Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan sebuah indikator penting yang menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk usia kerja (biasanya usia 15 tahun ke atas) yang secara aktif terlibat dalam pasar kerja—baik itu sudah bekerja maupun sedang aktif mencari pekerjaan. Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-109 Tahun 2026 tentang Indikator Kinerja Kunci, Bobot, dan Penilaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka ada penambahan indikator IKK dan perubahan formula perhitungannya. Perubahan target IKU dan IKK sebagaimana tertuang pada tabel berikut :

TABEL 3.1.
Perubahan Target IKU/IKK Tahun 2026

No	Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	IKU/SPM/IKK	Satuan	Realisasi 2025	Target 2026		Ket
					Awal	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
					Sesuai PK awal 2026		
	TUJUAN						
	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	IKU	%	71.42%	71.53%	71.60%	
	SASARAN						
	Persentase tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi		%	23.34%	25%	25.5%	
	Persentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan		%	44.70%	45.23%	45.30%	
	Persentase Kasus Perselisihan HI yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama/ Anjuran		%	74%	74.47%	74.50%	
	Tingkat Kepuasan Transmigran		%	N/a	50%	55%	
	Nilai SAKIP		%	81.10	81.48	81.5	
	IKK						
	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	IKK	%	23.34%	25%	25.5%	
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Peraturan Perusahaan/Peraturan Kerja Bersama , Lembaga Kerja Bersama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja)	IKK	%	44.70%	45.23%	45.30%	
	Persentase Pekerja Bukan Penerima Upah dan atau Pekerja Rentan Yang Mendapatkan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	IKK	%	74%	74.47%	74.50%	

3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan kabupaten Pasuruan

Berdasarkan ketentuan nasional tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah (Kepmendagri Nomor 050 yang diperbarui secara berkala), struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Pasuruan terbagi menjadi dua kelompok besar, yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Internal) dan Program Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan (Teknis/Layanan Masyarakat).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dimaksud Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

3.2.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026

Dalam rangka mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026, Dinas Ketenagakerjaan melaksanakan berbagai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tenaga kerja, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, serta memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja/buruh.

Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung prioritas pembangunan daerah, khususnya dalam penciptaan lapangan kerja bagi tenaga kerja asli Pasuruan. Selain itu, pelaksanaan kegiatan juga diarahkan untuk meningkatkan kompetensi pencari kerja melalui pelatihan kerja, memperkuat pelayanan penempatan tenaga kerja, menyediakan informasi pasar kerja, serta meningkatkan kualitas hubungan industrial antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah.

Pada Tahun 2026, dukungan terhadap prioritas pembangunan daerah tersebut dituangkan dalam sejumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan target kinerja serta alokasi anggaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan evaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, dapat diketahui perkembangan capaian target dan realisasi pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan pagu anggaran yang tersedia. Di uraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2												
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENDUKUP PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026												
NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026	33 PROGRAM PRIORITAS BUPATI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN		TARGET INDIKATOR KINERJA		REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN 2		CATATAN
						AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	KINERJA	ANGGARAN	
1	PPD 1 : Peningkatan kualitas SDM Tenaga Kerja yang berdaya saing	18. Cipta lapangan kerja untuk naker asli Pasuruan	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.2.01 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.2.01.02 Pelayanan antar Kerja	Rp. 75,000,000	Rp. 69,857,250	5.000	5.000	1500	Rp. -	
2					2.07.04.2.01.03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Rp. 48,350,000	Rp. 5,575,000	200	200	0	Rp. -	
3					2.07.04.2.01.04 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Rp. 35,000,000	Rp. 18,303,500	20	20	0	Rp. -	
4					2.07.04.2.01.05 Perluasan Kesempatan Kerja	Rp. 5,000,000	Rp. 3,016,250	16	16	0	Rp. -	
5				2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.2.04.03 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Rp. 35,000,000	Rp. 1,505,000	25	25	0	Rp. 2,199,500	
6									0			
7		19. Kemudahan perizinan dan hubungan industrial	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2.07.04.2.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Rp. 1,000,000	Rp. 5,670,000	100	100	10	Rp. 581,252	
8					2.07.04.2.03.03 Job Fair/Bursa Kerja	Rp. 230,000,000	Rp. 250,000,000	5.000	5.000	100	Rp. 44,215,000	
9		20. Pengembang an pusat lembaga sertifikasi profesi berbasis kebutuhan dunia kerja baik nasional maupun internasion al	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.01 Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.07.03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Rp. 6,610,409,092	Rp. 6,610,409,092	500	500	240	Rp. 2,649,406,220	
10					2.07.03.2.01.02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000	12	12	0	Rp. 1,160,000	

12				2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	2.07.03.2.01.01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Rp. 70,215,000	Rp. 7,111,250	14	14	2	Rp. 2,400,000	
13				2.07.03.2.03 Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	2.07.03.2.03.01 Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Rp. 24,600,000	Rp. 10,855,000	2	2	1	Rp. 2,693,000	
		32. Optimalisasi peran organisasi pengusaha dan serikat pekerja atau buruh untuk perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.07.05.2.01.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Rp. 1,100,000	Rp. 1,100,000	30	30	0	Rp. 500,000	
					2.07.05.2.01.02 Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Rp. 1,100,000	Rp. 1,100,000	30	30	0	Rp. -	
					2.07.05.2.01.03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Rp. 188,500,000	Rp. 188,500,000	15	15	5	Rp. 45,765,000	
				2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.07.05.2.02.01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1,100,000	Rp. 1,100,000	50	50	0	Rp. -	
					2.07.05.2.02.02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1,100,000	Rp. 1,100,000	50	50	0	Rp. 500,000	

				2.07.05.2.02.03 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Rp. 149,150,000	Rp. 149,150,000	5	5	0	Rp. 147,036,850	
				2.07.05.2.02.04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 556,530,000	Rp. 556,530,000	5	5	1	Rp. 435,662,074	
				2.07.05.2.02.05 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Rp. 4,053,772,800	Rp. 4,053,772,800	47.600	47.600	0	Rp. 562,800,000	
PPD 4: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang responsif, kolaboratif dan berbasis digital	18. Cipta lapangan kerja untuk naker asli Pasuruan	Peningkatan penyerapan tenaga kerja Kabupaten Pasuruan.	2.07.03.2.01 Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.07.03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Rp. 6,610,409,092	Rp. 6,610,409,092	500	500	240	Rp. 2,649,406,220	

3.2.2 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Asta Cita dan Program Strategis Nasional Tahun 2026

Dalam rangka mendukung pencapaian Asta Cita dan Program Strategis Nasional (ProSN) Tahun 2026, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan melaksanakan berbagai program, kegiatan dan subkegiatan yang diarahkan pada peningkatan kesempatan kerja, penguatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal tersebut menjadi penting mengingat kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan memiliki jumlah penduduk usia kerja dan angkatan kerja yang cukup besar serta didukung oleh perkembangan sektor industri, perdagangan, jasa, pertanian dan sektor informal. dalam tabel berikut :

Tabel 3.3													
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENDUKUNG ASTA CITA DAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL TAHUN 2026													
NO	ASTA CITA	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PROSN)	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PROSN) TEMATIK	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN		TARGET INDIKATOR KINERJA		REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN 2		CATATAN
							AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	KINERJA	ANGGARAN	
1	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Pengentasan Kemiskinan	Meningkatnya kesetaraan gender, kualitas hidup, dan peran perempuan melalui penguatan tata kelola dan pelembagaan PUG dalam pembangunan	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000	16	16	0	Rp. -	
2						Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Rp. 6,610,409,092	Rp. 6,610,409,092					
3						Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Rp. 6,610,409,092	Rp. 6,610,409,092					

Berdasarkan data yang tertuang dalam tabel, terdapat fokus utama pada program penempatan tenaga kerja yang selaras dengan upaya pengentasan kemiskinan

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan berperan dalam menyediakan pelayanan penempatan tenaga kerja, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi, serta memberikan fasilitasi terhadap perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Arah kebijakan tersebut juga sejalan dengan dokumen perencanaan Dinas Ketenagakerjaan yang menempatkan peningkatan kualitas SDM yang terampil dan produktif sesuai kebutuhan pasar kerja, peningkatan peluang dan kesempatan kerja, serta pembinaan hubungan industrial sebagai prioritas pembangunan ketenagakerjaan.

Salah satu bentuk pelaksanaan nyata pada Tahun 2026 adalah penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi bagi pencari kerja. Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Ketenagakerjaan melaksanakan beberapa paket pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja dan potensi industri daerah. Jenis pelatihan antara lain forklift, pengelasan, operator bubut CNC, menjahit upper sepatu, perawatan AC, barista, membatik dan tata rias. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk memperkecil kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Selain peningkatan kompetensi, perluasan kesempatan kerja juga dilakukan melalui fasilitasi pelayanan antar kerja dan kegiatan job fair. Pada pelaksanaan Mini Job Fair Kabupaten Pasuruan Tahun 2026, terdapat 11 perusahaan yang membuka 517 lowongan pekerjaan, yang terdiri dari 331 lowongan untuk perempuan dan 186 lowongan untuk laki-laki. Kondisi tersebut menggambarkan adanya kebutuhan tenaga kerja dari dunia usaha sekaligus menjadi peluang

bagi pencari kerja Kabupaten Pasuruan untuk memperoleh pekerjaan sesuai kualifikasi yang dipersyaratkan perusahaan.

Dengan demikian, pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi diarahkan untuk memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah dan nasional melalui peningkatan kesempatan kerja, pengurangan pengangguran, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan perlindungan serta kesejahteraan pekerja, dan penguatan kesempatan kerja yang inklusif bagi masyarakat, termasuk perempuan.

3.2.3 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026 tidak mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) karena pelaksanaannya tidak secara langsung ditujukan untuk memenuhi jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, maupun target pencapaian SPM yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tersebut lebih diarahkan pada pencapaian sasaran dan indikator kinerja perangkat daerah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya, sehingga tidak terdapat kontribusi langsung terhadap indikator, target, maupun pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar yang ditetapkan dalam SPM.

Dengan demikian, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dimaksud tidak dikategorikan sebagai Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung SPM Tahun 2026. Meskipun demikian, pelaksanaannya tetap merupakan bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah dan peningkatan kinerja pelayanan perangkat daerah sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.

3.2.4 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II diatas, beberapa isu aktual mempengaruhi Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan Tahun 2026, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.5															
Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026															
KABUPATEN : PASURUAN															
PERANGKAT DAERAH : DINAS KETENAGAKERJAAN															
NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / UNSUR	RENJA 2026				DPA 2026		P- RENJA 2026				SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK	PAGU RP	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP		TARGET IK	PAGU RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12-8	15=13-9	16
	URUSAN TENAGA KERJA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	3	Rp. 86,052,500.00	3	41,721,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	3	Rp. 33,677,000	DAU			- Perubahan Rekening Belanja Perjalanan Dinas Ke Rek. Belanja Narsum
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	12	Rp. 5,286,429,000.00	12	7,129,636,785	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	12	Rp. 6,780,348,000	DAU			-
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	orang	0	Rp. 1,013,654,736.00	-	-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	orang	0	Rp. -	DAU			-
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12	12	Rp. 91,440,000.00	12	98,880,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	Rp. 121,980,000	DAU		-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah						Administrasi Umum Perangkat Daerah							
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Unit	12	Rp. 50,000,000.00	12	10,265,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Unit	12	Rp. 5,885,000	DAU			-
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Unit	5	Rp. -	5	20,132,100	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Unit	5	Rp. 10,647,550	DAU			-
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Unit	3	Rp. 94,500,000.00	3	19,960,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Unit	3	Rp. 14,760,000	DAU			-
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Orang	100	Rp. 79,995,000.00	100	20,350,000	Fasiliitasi Kunjungan Tamu	Orang	100	Rp. 15,800,000	DAU			-
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		50	Rp. 185,652,000.00	50	99,639,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	50	Rp. 59,047,000	DAU			-
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan	1	Rp. 275,000,000.00	1	450,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan	1	Rp. -	DAU			-
		Pengadaan Mebel	Unit	1	Rp. 15,000,000.00	1	10,050,200	Pengadaan Mebel	Unit	1	Rp. -	DAU			-
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan	1	Rp. 350,000,000.00	1	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan	1	Rp. -	DAU			
		Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1	Rp. 15,000,000.00	1	-	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud	1	Rp. -	DAU			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat	900	Rp. 60,000,000.00	900	15,400,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat	900	Rp. 11,200,000	DAU			-
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	Rp. 800,000,337.00	12	502,674,592	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	Rp. 323,483,611	DAU			-
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	1	Rp. 93,107,090.00	1	21,359,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	1	Rp. 53,359,000	DAU			-

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Unit	1	Rp.	204,954,863.00	1	41,402,200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Unit	1	Rp.	109,152,200	DAU			-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan	14	Rp.	480,581,934.00	14	190,475,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan	14	Rp.	123,795,000	DAU			-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan	14	Rp.	46,600,000.00	14	22,960,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan	14	Rp.	17,080,000	DAU			-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung	2	Rp.	181,395,000.00	2	400,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung	2	Rp.	-	DAU			- Pembuatan Klinik Untuk Serikat Pekerja / Buruh
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	2	Rp.	200,000,000.00	2	127,665,679	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	2	Rp.	35,840,000	DAU			-
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA							PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA								
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)							Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)								
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen	1	Rp.	23,820,000	1	23,820,000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen	1	Rp.	12,020,000	DAU			-
		Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Perusahaan	5	Rp.	1,250,000	5	1,250,000	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Perusahaan	5	Rp.	-	DAU			-
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA							PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA								
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi							Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi								
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Peserta	500	Rp.	7,582,133,705.00	500	6,610,409,092	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Peserta	500	Rp.	6,610,409,092	DBHCHT			- Perubahan dalam Rekening untuk Program Tim
		Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Perusahaan	12	Rp.	72,000,000.00	12	5,000,000	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Perusahaan	12	Rp.	3,012,500	DAU			-
		Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Unit	10	Rp.	300,000,000.00	10	-	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Unit	10	Rp.	-	DAU			-
		Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Koordinasi	1	Rp.	-	1	3,420,000	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Koordinasi	1	Rp.	1,787,500	DAU			-
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta							Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta								
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	LPKS	14	Rp.	124,998,750.00	14	70,215,000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	LPKS	14	Rp.	7,111,250	DAU			-
		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja							Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja								
		Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Perizinan	2	Rp.	113,000,000.00	2	24,600,000	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Perizinan	2	Rp.	10,855,000	DAU			-
		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil							Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil								
		Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Perusahaan	10	Rp.	124,998,660.00	10	24,353,000	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Perusahaan	10	Rp.	11,342,500	DAU			-
		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
		Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Perusahaan	2	Rp.	24,998,660.00	2	22,512,000	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Perusahaan	2	Rp.	10,025,000	DAU			-

		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA												
		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota						Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota												
		Pelayanan antar Kerja	Peserta	5.000	Rp.	137,434,630.00	5.000	75,000,000	Pelayanan antar Kerja	Peserta	5.000	Rp.	69,857,250	DAU						
		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Orang	200	Rp.	199,999,868.00	200	48,530,000	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Orang	200	Rp.	5,575,000	DAU						
		Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Orang	20	Rp.	174,999,730.00	20	35,000,000	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Orang	20	Rp.	18,303,500	DAU						
		Perluasan Kesempatan Kerja	orang	16	Rp.	360,000,000.00	16	5,000,000	Perluasan Kesempatan Kerja	orang	16	Rp.	3,016,250	DAU						
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja						Pengelolaan Informasi Pasar Kerja												
		Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Aplikasi	1	Rp.	1,000,000	1	1,000,000	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Aplikasi	1	Rp.	725,000	DAU						
		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Orang	100	Rp.	10,000,000	100	10,000,000	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Orang	100	Rp.	5,670,000	DAU						
		Job Fair/Bursa Kerja	Peserta	5.000	Rp.	230,000,000	5.000	230,000,000	Job Fair/Bursa Kerja	Peserta	5.000	Rp.	250,000,000	DAU						
		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota						Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota												
		Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Orang	50	Rp.	1,000,000	50	1,000,000	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Orang	50	Rp.	1,000,000	DAU						
		Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Orang	25	Rp.	35,000,000	25	35,000,000	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Orang	25	Rp.	1,505,000	DAU						
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL						PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL												
		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota												
		Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Perusahaan	30	Rp.	160,998,600.00	30	1,100,000	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Perusahaan	30	Rp.	1,100,000	DAU						
		Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Perusahaan	30	Rp.	115,000,000.00	30	1,100,000	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Perusahaan	30	Rp.	1,100,000	DAU						
		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Dokumen	15	Rp.	168,760,000.00	15	188,500,000	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Dokumen	15	Rp.	188,500,000	DAU						
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota						Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota												
		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kasus	50	Rp.	126,964,500.00	50	1,100,000	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kasus	50	Rp.	1,100,000	DAU						
		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kasus	50	Rp.	115,000,000.00	50	1,100,000	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kasus	50	Rp.	1,100,000	DAU						
		Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Lembaga	5	Rp.	110,990,000.00	5	149,150,000	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Lembaga	5	Rp.	149,150,000	DAU						
		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Lembaga	5	Rp.	424,807,218.00	5	556,530,000	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Lembaga	5	Rp.	556,530,000	DAU						
		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Peserta	47.600	Rp.	-	47.600	4,053,772,800	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Peserta	47.600	Rp.	4,053,772,800	DBHCHT						

[illegible]

IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang strategis dan dinamis. Penyusunan dokumen ini dilatarbelakangi oleh adanya penyesuaian asumsi kebijakan, target kinerja, dan proyeksi pendanaan yang diselaraskan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan.

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan kondisi ketenagakerjaan, perubahan prioritas pembangunan daerah, hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan periode berjalan, serta perubahan kemampuan dan kebutuhan penganggaran daerah tetap selaras dengan Visi dan Misi Kepala Daerah serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan yang berlaku. Evaluasi terhadap target-target prioritas, seperti Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah, telah dirancang secara realistis agar dapat dicapai secara efektif dan efisien hingga akhir tahun anggaran

Untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan Renja Perubahan ini, terdapat beberapa langkah strategis yang akan diambil oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan, antara lain:

- a. Seluruh pejabat dan staf Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan secara bersama sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - Melaksanakan Perubahan Renja 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya; dan
 - Menjaga konsistensi antara Perubahan RKPD, Perubahan Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
- b. Menyelaraskan pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja
- c. Melakukan identifikasi kebutuhan tenaga kerja pada perusahaan dan sektor-sektor potensial di Kabupaten Pasuruan sebagai dasar

dalam menentukan jenis dan materi pelatihan sehingga lulusan pelatihan lebih mudah terserap di dunia kerja.

- d. Meningkatkan kemitraan dengan perusahaan, asosiasi pengusaha, lembaga pelatihan kerja, sekolah, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasar kerja.
- e. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan periode berjalan serta melakukan penyesuaian terhadap target, indikator, kegiatan, dan kebutuhan anggaran dalam Perubahan Renja Tahun 2026 agar lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan prioritas pembangunan Kabupaten Pasuruan.
- f. Melakukan monitoring serta evaluasi secara berkala (triwulanan dan semesteran) terhadap penyerapan anggaran dan capaian kinerja. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala sejak dini agar dapat diambil tindakan korektif

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2026, selanjutnya akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RKA-P) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (Perubahan KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Perubahan Anggaran Sementara (Perubahan PPAS), dan dokumen ini diharapkan menjadi panduan yang komprehensif bagi seluruh jajaran internal dinas, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan dampak positif yang nyata bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pasuruan.

BUPATI PASURUAN

MOCHAMAD RUSDI SUTEJO